

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU, ARTIKEL JURNAL, DAN DISERTASI

- Abdul Ghoffar. *Dinamika 50 Mahkamah Konstitusi di Dunia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Abdul Latif. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Adinda Putri Kamalia, Dina Aulia, Farida Syah Damanik, dan Dini Vientany. "Pajak Daerah dan Pajak Pusat: Menuju Sistem Pajak Nasional yang Berkeadilan." *Mustari Nerasa Manajemen Ekonomi* 5, no. 11 (2024).
- Agnes Harvelian, Muchamad Ali Safa'at, Aan Eko Widiarto, dan Indah Dwi Qurbani. "Constitutional Interpretation of Original Intent on Finding The Meaning of Social Justice in The Constitutional Review." *Yustisia* 9, no. 3 (2020).
- Aidul Fitriciada Azhari. "Revolutiegrondwet and Amendment of the 1945 Constitution: From Decolonization to Democratization." *Indonesian Law Journal*, t.t.
- Allen Mendenhall. "The Corrective Careers of Concurrences and Dissents." *Faulkner Law Review* 8, no. 1 (2016).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2019s.
- Arend Lijphart. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Ariesta Wibisono Anditya. "Pemeriksaan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka oleh Praperadilan dalam Konstelasi Pancasila." *Justitia Et Pax* 34, no. 1 (2018).
- Bachtiar. *Politik Hukum Konstitusi Pertanggungjawaban Konstitusional Presiden*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 1999.
- Baharuddin Riqiey. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Bimo Fajar Hantoro. "Originalisme dan Syarat Kesenjangan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Undang* 6, no. 1 (2023).
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Denny Indrayana. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan, 2007.
- Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007).

- Dhian Deliani. "Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010." Universitas Indonesia, 2011.
- Dri Utari Christina Rachmawati. "Prerogatif Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial." Universitas Airlangga, 2024.
- Faiqah Nur Azizah. "Perbandingan Sistem Perubahan Konstitusi di Negara Amerika, Perancis, dan Indonesia." *Adalah* 6, no. 2 (2022).
- Fajar Laksono Soeroso. "Linieritas Legislasi dan Ajudikasi Konstitusional dalam Penegakan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015).
- Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani. "Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023).
- Feri Amsari. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Cet-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Garry Rafeldha Sharon Tapilatu. "Fungsi Hak Prerogatif Presiden dalam Rangka Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial di Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Gregory Leyh. *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah, dan Haeruman Jayadi. "Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945." *Media Hukum* 23 (2016).
- Hardjono. *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Herdiansyah Hamzah. "Penjabaran Prinsip-Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi." Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.
- I Dewa Gde Palguna. "Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi." Dipresentasikan pada Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian, Fakultas Hukum UGM, 27 Agustus 2019.
- I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta. *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-Persoalan Pokok*. Malang: Setara Pers, 2019.
- Idul Rishan. *Hukum dan Politik Kenegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Imam Sujono. "Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).

- Indra Muchlis Adnan. *Hukum Konstitusi di Indonesia*. Bantul: Trussmedia Grafika, 2017.
- Ismail Suny. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- . “Presiden Reagan VS. Kongres Amerika Serikat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1998.
- JA Pontier. *Penemuan Hukum*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Jakob Tobing. “The Essence of The 1999-2002 Constitutional Reform in Indonesia: Remaking The Negara Hukum. A Socio-Legal Study.” *Universiteit Leiden*, 2023.
- Jan Michiel Otto, Sulistyowati Irianto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, dan Julia Arnscheidt. “Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries].” Dalam *Kajian Sosio Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Menuju Negara Hukum Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Joan Steinman. “Signed Opinions, Concurrences, Dissents, and Vote Counts in the U.S. Supreme Court: Boon or Bane? (A Response to Professors Penrose and Sherry).” *Akron Law Review* 53, no. 3 (2019).
- John O. McGinnis dan Michael B. Rappaport. “Unifying Original Intent and Original Public Meaning.” *Northwestern University Law Review* 113, no. 6 (2019).
- KC Wheare. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Kompilasi Konstitusi Sedunia*. Buku-I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Lili Romli. “Problematisasi dan Penguatan Sistem Presidensial.” *Jurnal Communitarian* 1, no. 1 (2018).
- Linda H. Edwards. *Legal Writing and Analysis*. New York: Wolters Kluwer, 2015.
- Lukman Irwan. “Problematisasi Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden.” Dipresentasikan pada Focus Group Discussion Sistem Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Universitas Hasanudin, t.t.
- Mahfud MD. “Hak Prerogatif Itu Sempel.” *Sindo News* (blog), 25 Oktober 2014. <https://nasional.sindonews.com/berita/915246/18/hak-prerogatif-itu-sempel>.
- . *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Margarito Kamis. *Pembatasan Kekuasaan Presiden*. Malang: Setara Pers, 2014.
- Maria SW Sumardjono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Matthew J. Steilen. “How to Thinck Constitutionally About Prerogative: A Study of American Usage.” *Buffalo Law Review* 66, no. 3 (2018).

- MC Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*. Jakarta: Serambi Indonesia Modern, 2008.
- Mei Susanto. “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/201.” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016).
- Michele Brandt, Jill Cottrell, Yash Ghai, dan Anthony Regan. *Constitution-making and Reform: Options for the Process*. Switzerland: Interpeace, 2011.
- Mirza Satria Buana. *Perbandingan Hukum Tata Negara Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Mohammad Fajrul Falaakh. *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Mohammad Mahrus Ali. *Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Muchamad Ali Safa’at, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Soeroso. “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017).
- Muhammad Ilham Hermawan. *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Cet-2. Jakarta: Kencana, 2022.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Buku IV Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Ni’matul Huda. “Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” *Ius Quia Iustum* 8, no. 18 (2001).
- . *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Nurliah Nurdin. *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat: Rivalitas Kekuasaan Antara Presiden dan Legislatif (2004-2009)*. Jakarta: MIPI, 2012.
- Pan Mohammad Faiz. *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Patrialis Akbar. *Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewa Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Paul Scholten. *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan-17. Jakarta: Kencana, 2022.
- Puguh Windrawan. “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Keberadaan Lembaga Negara Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/PUU-IV/2006; Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 030/SKLN IV/2006.” *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014).
- Raff Danelson. “Legal Inconsistencies.” *Tulsa Law Review* 55, no. 1 (2019).
- Reko Dwi Salfutra. “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* XII, no. 2 (2018).
- Richard B. Stephens. “The Function of Concurring and Dissenting Opinions in Courts of Last Resort.” *Florida Law Review* 5, no. 4 (1952).
- Riri Nazriyah. *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 1999*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Buku Dua)*. Buku Dua. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Buku Empat)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Buku Enam)*. Buku Enam. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Buku Satu)*. Buku satu. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 (Buku Tiga)*. Buku Tiga. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2001 (Buku Dua)*. Buku Dua. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2001 (Buku Satu)*. Buku Satu. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2001 (Buku Tiga)*. Buku Tiga. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2002 (Buku Empat)*. Buku Empat. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2002 (Buku Satu)*. Buku Satu. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2002 (Buku Tiga)*. Buku Tiga. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- RM AB Kusuma. "Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2004).
- . *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial "Orde Reformasi"*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2011.
- Robert J. Reinstein. "The Limits of Executive Power." *American University Law Review* 59, no. 259 (2009).
- Rod Hay. *Two Treaties of Government, In the Former, The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown: The Latter, Is an Essay Concerning the Original, Extent, and*

- End, of Civil Government, London: 1823. McMaster University Archive of the History of Economic Thought, t.t.*
- Ross J. Corbett. "The Extraconstitutionality of Lockean Prerogative." *The Review of Politics* 68, no. 3 (2006).
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet-18. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Sri Jaya Lesmana. *Hukum Indonesia (Indonesian Law)*. Banten: Berkah Aksara Cipta Karya, 2023.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- . *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suwarno Abadi. "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015).
- Tanto Lailam. "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Media Hukum* 21, no. 1 (2014).
- "The Rule of Law Checklist." Venice Commission of the Council Europe, 2016.
- Tim Penulis APHTN HAN. *Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Tim Penyusun. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 – Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Titon Slamet Kurnia. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Election Court: Refleksi Teoritis." *Refleksi Hukum* 3, no. 1 (2018).
- . "Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016).
- Umbu Rauta, Indriani Wauran, dan Ninon Melatyugra. "Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi." Laporan Penelitian. Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2018.
- Valina Singka Subekti. *Menyusun Konstitusi Transisi: pergulatan kepentingan dan pemikiran dalam proses perubahan UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Widodo Dwi Putro, Tristam Pascal Moeliono, F. Budi Hardiman, Zainal Asikin, Sulistyowati Irianto, Cahyowati, dan Rikardo Simarmata. *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post Truth*. Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Ke VII. Sanabil, 2020.
- Yoav Dotan. "Making Consistency Consistent." *Administrative Law Review* 57, no. 4 (2005).
- Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman. "Gagasan Penataan Legislasi Nasional berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023).

- Zainal Arifin Mochtar. *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint)*. Cet-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- . *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Zaka Firma Aditya. “Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020).

2. LAIN-LAIN

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Arti kata independen,” t.t. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independen>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Arti kata mandiri,” t.t. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mandiri>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Arti kata prerogatif,” t.t. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prerogatif>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Arti kata privilese,” t.t. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privilese>.
- Constitution of Algeria (1963), [Constitution of Algeria \(1963\) \(marxists.org\)](http://marxists.org)
- Constitute Project, Algeria 2020, [Algeria 2020 Constitution - Constitute \(constituteproject.org\)](http://constituteproject.org)
- Emily Haves. “Prerogative Powers of the Crown.” House of Library Briefing Lords, 2019.
- International IDEA, People Democratic Republic of Algeria, 2020, [مسودة الدستور - 07.05.2020-1_EN-clean copy_0.pdf \(constitutionnet.org\)](https://www.constitutionnet.org)
- Mahfud MD. “Hak Prerogatif Itu Sempel.” *Sindo News* (blog), 25 Oktober 2014. <https://nasional.sindonews.com/berita/915246/18/hak-prerogatif-itu-sempel>.
- Michele Brandt, Jill Cottrell, Yash Ghai, dan Anthony Regan. *Constitution-making and Reform: Options for the Process*. Switzerland: Interpeace, 2011.
- Our World In Data, Distribution of democracy index 1998, [Distribution of democracy index, 1998 \(ourworldindata.org\)](http://ourworldindata.org)
- RM AB Kusuma. “UUD 1945 Mengenal Hak Prerogatif.” *Hukum Online* (blog), 16 Agustus 2000. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uud-1945-mengenal-hak-prerogatif-hol380/>.
- The Avalon Project, Yale Law School Lillian Goldman Law Library, The Federalist Papers : No 69. https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed69.asp
- _____, Yale Law School Lillian Goldman Law Library, The Federalist Papers : No 74. https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed74.asp

- “The Rule of Law Checklist.” Venice Commission of the Council Europe, 2016.
- Wahyu Nurhadi. “Gelombang Demokratisasi Ketiga Review dari The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century (Samuel P. Huntington, 1991),” 2020. https://www.researchgate.net/profile/Wahyu-Nurhadi-2/publication/343360577_GELOMBANG_DEMOKRATISASI_KETIGA/links/5f24c4b4458515b729f8b956/GELOMBANG-DEMOKRATISASI-KETIGA.pdf.
- Zainal Arifin Mochtar. “Inkonstitusionalitas Perppu Cipta Kerja.” *Media Indonesia* (blog), 2023. <https://mediaindonesia.com/kolompakar/549640/inkonstitusionalitas-perppu-cipta-kerja>.
- Yuliandri, “Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?” *Hukum Online* (blog), 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607/>